



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 15 April 2021

Halaman: 1

Pansus: Pemkot Jangan Tebang Pilih

TEGURAN keras dilayangkan panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Jogja. Terkait terjadinya kerumunan dalam penyelenggaraan pasar sore Ramadan di Kota Jogja. Mereka meminta Pemkot Jogja tak tebang pilih dalam menerapkan prokes.

"Satpol PP (Kota Jogja) harus tegas menerapkan prokes. Jika tidak kami minta Ketua Satgas Covid-19 Kota Jogja untuk mengevaluasi," kata Ketua Pansus Covid-19 Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto kemarin (14/4) ■

► Baca Pansus:... Hal 7

Pansus: Pemkot Jangan Tebang Pilih

Sambungan dari hal 1

Dia mengaku belum melihat secara langsung kerumunan di pasar sore Ramadan. Tapi dari foto dan video di media massa dan media sosial, dia menilai harusnya ada tindakan tegas dari Satpol PP.

Menurut dia, Satpol PP memiliki kewenangan untuk membubarkan kerumunan yang terjadi. Langkah yang selama ini sudah dijalankan. Fokki meminta hal itu juga dilaksanakan saat terjadi kerumunan di pasar sore Ramadan. "Selama tegas dan tidak tebang pilih, masyarakat dan penyelenggara bisa menerima," ungkapnya.

Politisi PDIP itu mengingatkan, saat ini masih diberlakukan pengetatan secara terbatas ke-

giatan masyarakat (PTKM) maupun tanggap darurat Covid-19 oleh Gubernur DIJ. "Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, Covid-19 ini masih ada," tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogja Krisnadi Setiawan. Dia mengingatkan, penyelenggaraan kegiatan keramaian harus memperhatikan zona aman pandemi yang sudah ditetapkan oleh Pemkot. Kegiatan keramaian hanya diizinkan di zona hijau. "Masyarakat harus memahami masih adanya pandemi Covid-19 yang belum tuntas sehingga wajib menerapkan protokol kesehatan 5M," pesannya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, untuk mengantisipasi pengunjung yang datang

dari berbagai wilayah di luar zona hijau, maka penyelenggara wajib memastikan pengunjung dan penjual harus memakai masker, menjaga jarak pedagang, perlengkapan prokes dan pengaturan teknis lapangan untuk menghindari terjadinya kerumunan. "Di masa yg akan datang Pemkot perlu untuk memfasilitasi pasar Ramadan atau kegiatan sejenis dalam bentuk online," tuturnya.

Dia juga mengingatkan, apabila terjadi lonjakan kasus pada saat waktu penyelenggaraan di lokasi kegiatan maka panitia dan Pemkot berhak menghentikan kegiatan. "Karena konteksnya seperti halnya tempat wisata yang sudah mulai ramai tanpa ada pembatasan yang signifikan," jelasnya. (wia/pra/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005